

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Abdul Kholik, 2020, *Penyempurnaan Sistem Bikameral Indonesia dan Sinergitas DPD dengan DPR*, CV Pilar Nusantara, Kota Semarang.

Agussalim Andi Gadjong, 2017. *Pemerintahan Daerah: Kajian Politik Dan Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Abdul Rasyid Thalib, 2018, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti. Bandung.

Fajlurrahman Jurdi, 2023, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Prenada Media Group

Hudali Mukti, 2023, *Perizinan Pertambangan Batu Bara Terintegrasi dalam Mewujudkan Pembangunan Daerah Berkelanjutan*, Deepublish Digital, Yogyakarta.

Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*. cetakan ke 3. Yogyakarta. Mirra Buana Media,

Jimly Asshiddiqie, 2006. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

—, 2016. *Perkembangan dan konsolidasi Lembaga negara pasca reformasi*. Cet. Ke-3, sinar grafika,



Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, 2023, *Hukum Tata Ruang dalam konsep kebijakan otonomi daerah*, Bandung: Nuansa Cendekia.

Lexi J Moeleong, 2018, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya,

Marwan Mas. 2018. *Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara*. Depok, PT RajaGrafindo Persada.

Made Nurmawati dkk.2017. *Hukum kelembagaan Negara*.Fakultas Hukum, Universitas Udayana.

Rahayunir Rauf, 2006, *Kelembagaan RT dan RW sejarah, Hakekar, dan Prospek Kelembagaan*. Pemerintah Kabupaten Kuansing.

Riant Nugroho Firrean Suprpto, 2021, *Administrasi Pemerintahan Desa Bagian 3: Otonomi dan Pembangunan Desa*, Jakarta : Elex Media Komputindo

Sofyan A. Djalil. *Strategi Nasional Reformasi regulasi Mewujudkan Regulasi Yang Sederhana dan Tertib*. Kementrian ATR/BPN. 2015

Yusri Munaf. 2014.*Konstitusi dan kelembagaan negara*. Marpoyan Tujuh Publising. Pekanbaru.



## **Skripsi/Tesis**

Aditya Dwi Rohman, 2023, *Kewenangan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam Keamanan dan Perlindungan Informasi Pribadi*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Fitrianti Agustinda, 2022. *Analisis Yuridis wewenang dan tanggung jawab wakil walikota Palembang periode 2018-2023 dalam pemerintahan di era otonomi daerah*. Tesis, Fakultas Hukum Universitas Palembang.

Nurfajrin Ramadhan, 2020, *Urgensi Pembentukan Lembaga eksekutor dalam Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

## **Jurnal**

Abdul Majir dan Ismail Nasar, 2021, *Pengaruh E-commerce Era Industri 4-0 dan Kesiapan Menyambut Revolusi Society 5.0*, Sebatik Vol. 25 No. 2 .

Aini Shaliha dkk. 2023, *Perbandingan constitutional theory dalam doktrin para ahli sebagai bentuk landasan kelembagaan*. Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial. Vol. 3 No. 1 Institut Agama Islam Madura.



Daniel Aditia Situngkir, 2023, *Mengenal Teori Demokrasi dan Teori Kewenangan dalam Ilmu Hukum*, Ensiklopedia of Journal, Vol. 5 No.4, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Barat, Pariaman,

Made Nurmawati, I Nengah Suantra, dan Luh Gde Astaryani, 2017. *Hukum Kelembagaan Negara*. Fakultas Hukum, Universitas Udayana.

Muhamad Hasam Rumlus dan Hanif Haryadi, 2020 . *Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi dalam Media Elektronik*, Jurnal HAM, Volume 11 Nomor 2

Nadia Tsamara, 2021, *Perbandingan Aturan Perlindungan Privasi Atas Data Pribadi Antara Indonesia dengan Beberapa Negara*, Jurnal Suara Hukum, Vol.3 No.1, Universitas Indonesia, Depok,

Odang Suparman, 2023, *Konsep Lembaga Negara Indonesia dalam Perspektif Teori Tria Politica Berdasarkan Prinsip Chek and Balance System*. Jurnal Hukum Islam dan Humaniora Vol. 2 No. 1 UIN Sunan Gunung Jati Bandung

Padma Widyantari And Adi Sulistiyono, 2020. "Pelaksanaan Harmonisasi Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (Ruu Pdp)," Jurnal Privat Law 8, No. 1,



Rizal, Muhamamad Saiful. 2019. Perbandingan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia dan Malaysia. *Jurnal Cakrawala Hukum* 10. No.2

S margi, Maulida Khazanah. 2019. Kedudukan mahkama komstitusi dalam kelembagaan negara. *Konsultan Hukum Jaya Baru Surabaya. Jurnal Rechten, riset Hukum dan hak Asasi Manusia.*

Upik Mutiara, Romi Maulana, 2020, *Perlindungan Data Pribadi sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia atas Perlindungan Diri Pribadi*, Indonesian Journal of Law Policy Studies, Volume 1 No. 1, Universitas Muhammadiyah Tangerang, Kota Tangerang

udi Widagdo, 2014. *Politik hukum Lembaga negara yang daitur dalam UUD Negara republic Indonesia Tahun 1945.* *RechtIdee Jurnal Hukum*, Vol 8 No.1

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan



Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan data pribadi

### **Artikel/Berita**

Amin Iskandar, 19 November 2022, Undang-Undang Pelindungan atau Perlindungan? <https://www.kompas.id/baca/opini/2022/11/17/pelindungan-dan-perlindungan>

Ditjen Aptika, 2022, Kominfo Gerak Cepat Tangani Lima Kasus Baru Kebocoran Data. [Kominfo Gerak Cepat Tangani Lima Kasus Baru Kebocoran Data – Ditjen Aptika](#)

Hermon, 24 Mei 2021, “Data Pribadi Bocor, ini Risiko yang Mengintai. [Data Pribadi Bocor, Ini Risiko yang Mengintai \(beritasatu.com\)](#)

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 31 Oktober 2023, Mengungkap Konsep dan Kriteria Lembaga Negara dengan “Constitutional Importance” [Mengungkap Konsep dan Kriteria Lembaga Negara dengan “Constitutional Importance” | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia \(mkri.id\)](#)





Optimized using  
trial version  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)